

## **BAB 4**

### **INTEGRASI EKONOMI ASEAN**

Bab ini akan membahas analisa tentang proses integrasi ekonomi ASEAN. Sub-bab pertama membahas tentang perkembangan regionalisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sub-bab kedua dan ketiga adalah analisis proses perkembangan ASEAN, yang berawal dari pembentukan AFTA menuju integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Sub-bab keempat mengenai evolusi dari integrasi ekonomi ASEAN dalam konteks regional, sub-bab kelima membahas tentang sikap *open regionalism* ASEAN serta sub-bab keenam akan membahas mengenai implikasi dari sikap *open regionalism* ASEAN, yaitu dengan cara membentuk FTA dengan China dan India.

#### **4.1 Perkembangan Regionalisme**

Regionalisme telah menjadi fitur yang menonjol dari sistem perdagangan global untuk beberapa tahun belakangan, sebagian terjadi karena relatif lebih lambat proses negosiasi perdagangan multilateral yang telah dilakukan di bawah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) / World Trade Organization (WTO). Perkembangan baru-baru ini perjanjian perdagangan regional (RTAs) dan bentuk-bentuk kerjasama regional, dipicu oleh integrasi pasar Uni Eropa (UE) yang sejauh ini merupakan contoh integrasi ekonomi regional yang paling sukses, telah menarik perhatian pada kebutuhan negara-negara untuk memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara lain dengan memberikan manfaat ekonomi menuju integrasi regional.

##### **4.1.1 Implikasi Ekonomi Dari Integrasi Regional**

Diakui secara luas, argumen yang paling mendukung dalam integrasi regional adalah manfaat memperluas pasar dan mempromosikan kompetisi dengan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Kesejahteraan ekonomi meningkat ketika sumber daya yang sebelumnya dipakai dalam produksi dalam negeri yang mahal secara efisien

dialokasikan kembali ke arah keuntungan komparatif negara dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar (efek penciptaan perdagangan). Perluasan pasar regional juga dapat dilihat oleh negara-negara di luar kawasan sebagai peningkatan peluang perdagangan.

Namun, integrasi regional juga memiliki potensi risiko. *Pertama*, dapat menimbulkan kerugian kesejahteraan jika "efek penciptaan perdagangan" dibayangi oleh "efek pengalihan perdagangan", yaitu jika penghapusan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota menyebabkan perdagangan lebih efisien dengan negara-negara non-anggota dibandingkan jika dialihkan ke negara anggota yang kurang efisien. *Kedua*, akan menyebabkan "pengalihan efek investasi" dimana investasi sumber daya yang terbatas dialihkan ke pasar terpadu dengan skala yang lebih besar. Ketiga, ada kekhawatiran terhadap "efek mangkuk mie" ("noodle bowl effect"), mengacu pada potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kurangnya koherensi antara perbedaan perjanjian yang tumpang tindih. Tumbarello mengutip perjanjian bilateral yang dinegosiasikan oleh beberapa anggota dari masing-masing negara ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN, bahkan ASEAN sendiri sedang melakukan negosiasi dengan negara yang sama.<sup>1</sup> Karena ada sedikit usaha untuk mencapai konsistensi dan harmonisasi dalam perjanjian yang dinegosiasikan, muncul aturan yang membatasi dan inkonsistensi dari aturan awal yang merumitkan sistem perdagangan. Sebuah contoh yang diberikan pada perbedaan pada aturan awal adalah bahwa dari Selandia Baru-Singapura dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang menggunakan kriteria 40 persen nilai tambah, sedangkan ASEAN-India, Singapura-India dan Jepang-Singapura memberlakukan beberapa perubahan dari kriteria tarif awal atau ketentuan yang lebih kompleks lainnya.

---

<sup>1</sup> Patrizia. Tumbarello, "Are Regional Trade Agreements in Asia Stumbling or Building Blocks? Implications for the Mekong-3 Countries", IMF Working Paper WP/07/53, March 2007, International Monetary Fund.

## 4.2 Dari ASEAN Menuju AFTA

Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, ketika 5 asli anggota-Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. ASEAN sekarang terdiri dari 10 negara anggota, dengan bergabungnya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Namun ASEAN Sekretariat baru didirikan pada tahun 1976, tepat setelah akhir Perang Vietnam dan hampir sepuluh tahun setelah pendirian ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN berkantor di Jakarta, Indonesia.<sup>2</sup>

Pada awalnya, ASEAN didirikan untuk tujuan politik, mengupayakan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Dengan melihat ke belakang, karena rasa saling percaya diantara negara-negara anggota, kita dapat mengatakan bahwa ASEAN sesungguhnya telah berkontribusi untuk menjaga stabilitas di seluruh Asia Tenggara. Dari akhir 1970-an dan seterusnya, negara-negara ASEAN mulai memikirkan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi, tapi hal ini sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang lama. Meskipun *Preferential Trading Agreement* (PTA) telah disepakati pada tahun 1977, namun dampaknya terbatas: konsesi tarif yang diberikan negara-negara ASEAN dalam kerangka PTA terlalu kecil, atau terkait dengan produk yang hanya mewakili sebagian marjinal perdagangan intra-ASEAN.<sup>3</sup>

Pada saat itu, negara-negara ASEAN tidak siap untuk membuka diri lagi, terutama karena kesenjangan pembangunan yang ada antara negara-negara anggota dan dikarenakan kenyataan bahwa beberapa anggota memilih menerapkan strategi substitusi impor. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan cukup tinggi, sehingga anggota ASEAN tidak merasa perlu untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan. Barulah pada paruh kedua tahun 1980-an liberalisasi

---

<sup>2</sup> G.O.Pasadilla, (2004), *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

<sup>3</sup> L. Cuyvers, and W. Puppaves, *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper, No.6, September 1996.

perdagangan mulai serius berjalan di ASEAN-6.<sup>4</sup> Pada saat itu, negara-negara ASEAN telah mendapatkan cukup percaya diri dan juga merasa meningkatnya tekanan eksternal yakni dari IMF dan Bank Dunia untuk mempercepat upaya liberalisasi perdagangan. Akhirnya, anggota ASEAN juga ingin melindungi diri terhadap blok perdagangan baru yang dikembangkan oleh NAFTA dan Uni Eropa, karena mereka khawatir terhadap nilai ekspor mereka ke pasar-pasar besar ini.<sup>5</sup>

#### 4.2.1 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)

Diawali oleh munculnya regionalisme global dengan berbagai potensi, manfaat dan pandangan yang secara umum pesimis terhadap inisiatif perdagangan multilateral di bawah WTO, ASEAN memulai beberapa inisiatif menuju konvergensi ekonomi regional, salah satunya dengan membentuk *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA). AFTA adalah langkah besar pertama yang diberlakukan tahun 1992.

Pada bulan Januari 1992, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, dengan mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pada 1995 mereka juga mewujudkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan pada tahun 1998, menteri-menteri ASEAN mendirikan Area Investasi ASEAN (AIA) yang pada akhirnya berfokus pada perjanjian AFTA.

Perjanjian AFTA selangkah lebih jauh daripada pembentukan PTA tahun 1977: perjanjian baru ini bertujuan untuk mengurangi tarif pada berbagai macam produk, juga diupayakan penghapusan hambatan non-tarif, pembatasan kuantitatif dan tindakan lintas-batas lainnya.<sup>6</sup> Dengan menghilangkan hambatan tarif antara anggota ASEAN, AFTA akan mengubah ekonomi

<sup>4</sup> “ASEAN-6” ditujukan untuk 6 negara pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam. “ASEAN-CLMV” ditujukan untuk negara yang baru bergabung kedalam ASEAN dan tertinggal perkembangannya: Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.

<sup>5</sup> S.F. Naya, and P. Imada, *The Long and Winding Road Ahead for AFTA*, dalam: Imada & Naya (Eds.) (1992), *AFTA: The Way Ahead*, ISEAS, Singapore, hal. 53-66. S.F. Naya, (2004), *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal. 1-16.

<sup>6</sup> G.O. Pasadilla, *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

ASEAN menjadi suatu basis produksi tunggal dan secara bersamaan akan menciptakan pasar regional dari 500 juta konsumen. Perjanjian AFTA merupakan sebuah liberalisasi perdagangan bertahap, mengurangi tingkat tarif yang dikenakan pada impor intra-ASEAN tidak lebih dari lima persen selama 15 tahun. Pengurangan tarif hanya berlaku untuk produk yang sesuai dengan konten persyaratan ASEAN. Ini berarti bahwa paling tidak 40% dari nilai suatu produk harus berasal dari negara-negara ASEAN.<sup>7</sup>

Menurut rencana awal, AFTA akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2008. Namun, pada tahun 1994, Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan untuk mempercepat proses, memajukan waktu penyelesaian hingga 2003. Pada tahun 1995, waktu target dimajukan lagi menjadi tahun 2002. Pada saat yang bersamaan, diputuskan bahwa tarif pada impor intra-ASEAN sepenuhnya harus dihapuskan pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk ASEAN CLMV.<sup>8</sup>

#### 4.2.2 The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Dalam prakteknya, skema *The Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) diperkenalkan untuk mengimplementasikan Perjanjian AFTA. Skema CEPT mencakup produksi produk manufaktur dan semi manufaktur, termasuk barang modal dan proses produk pertanian. Proses liberalisasi dilakukan pada kecepatan yang berbeda sesuai dengan kelompok produk: dibedakan berdasarkan skema “fast track” (jalur cepat) dan “normal track” (jalur normal). Produk dalam *Inclusion List* (IL) harus segera diliberalisasi melalui pengurangan tarif CEPT maksimal 5% pada tahun 2002. Negara-negara CLMV ASEAN diperbolehkan untuk menerapkan hal ini dengan tenggat waktu yang berbeda: Vietnam telah memenuhi tujuan ini pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada 2008 dan Kamboja pada tahun 2010. Kesepakatan

<sup>7</sup> ASEAN Secretariat, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, Singapore, 28 January 1992. (<http://www.aseansec.org/12375.htm>)

<sup>8</sup> *Ibid.*

AFTA juga memungkinkan untuk pengecualian pada beberapa produk yang sensitif terhadap pengurangan tarif di bawah skema jalur cepat atau normal. Oleh karena itu, *Temporary Exclusion Lists* (TEL), *Sensitive Lists* (SL) dan *General Exception Lists* (GE) disusun oleh semua anggota ASEAN.<sup>9</sup> *Temporary Exclusion List* (TEL) dapat dikecualikan dari liberalisasi perdagangan untuk jangka waktu terbatas. Pada akhirnya, semua produk dalam TEL harus ditransfer ke *Inclusion List* (IL) untuk diterapkan ke tarif maksimal 5%. *Sensitive Lists* (SL) utamanya berisi produk pertanian mentah (belum diolah). Perdagangan produk-produk ini harus diliberalisasi pada tahun 2010 untuk ASEAN-6, sedangkan anggota baru mendapatkan kerangka waktu yang lebih lama. *General Exception Lists* (GE) secara permanen dikecualikan dari liberalisasi perdagangan dengan alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan perlindungan barang artistik, nilai sejarah atau arkeologi.<sup>10</sup>

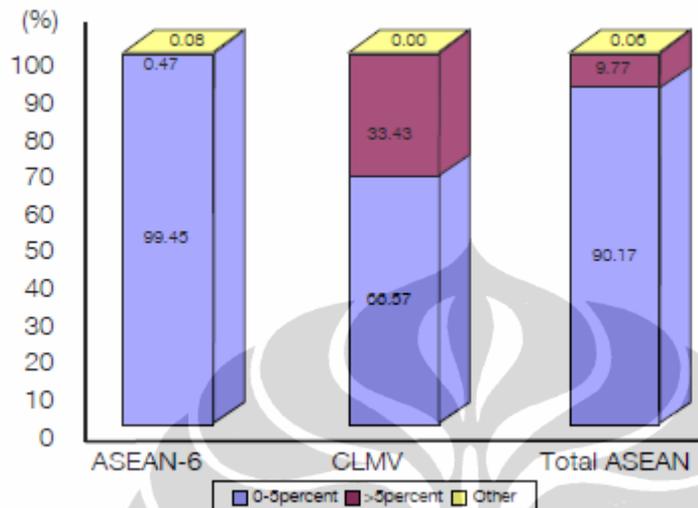
Lebih dari 99% dari produk dalam *Inclusion List* (IL) CEPT ASEAN-6 memiliki tarif yang tidak lebih dari 5% (Gambar 1). pada tahun 2003, Sejumlah kecil produk yang masih memiliki tarif di atas 5%, terutama produk yang telah dialihkan dari *Sensitive Lists* (SL) dan *General Exception Lists* (GE). Selain itu, hampir semua produk yang diperdagangkan oleh ASEAN-6 di kawasan adalah bagian dari IL. Untuk ASEAN CLMV, tarif sebesar 66,57% dari produk dalam IL telah diturunkan menjadi maksimal 5%. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa tidak lebih dari 80% dari produk yang diperdagangkan oleh negara-negara di kawasan merupakan bagian dari IL. Ini semua berarti, bahwa ASEAN IL-10 (total ASEAN) sekarang terdapat sekitar 90% dari total tarif baris dan bahwa 90,17% dari tarif dalam IL baris memiliki tarif berkisar antara 0-5%.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> ASEAN Sekretariat, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, an update, Jakarta, November 1999. ([www.aseansec.org/10881.htm](http://www.aseansec.org/10881.htm))

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> ASEAN Sekretariat, *ASEAN Annual Report 2003-2004*, Chapter 2: *Economic Integration and Cooperation*, Jakarta, 2004. (<http://www.aseansec.org/ar04.htm>), dan AFTA Council, *The Seventeenth*

Grafik 4.1  
 Persentase Tarif Baris pada 0-5 percent dalam Paket Tentatif CEPT 2004



Catatan: "Lainnya" mewakili tarif baris dengan tugas khusus berdasarkan data sebelum aplikasi Tarif Harmonised Nomenklatur ASEAN (AHTN)

Grafik 4.1 menunjukkan skema reproduksi yang diterapkan untuk pengurangan bertahap dari tarif CEPT rata-rata. Tingkat tarif rata-rata di bawah Skema CEPT untuk ASEAN-10 berada di 2,63% pada tahun 2003, dan berkisar dari 0% di Singapura menjadi 7,96% di Kamboja, negara anggota ASEAN yang paling muda. Pada tahun 2004, tarif rata-rata untuk ASEAN-6 lebih jauh menurun menjadi 1,51%, dibandingkan 12,76% pada tahun 1993 ketika AFTA dimulai.<sup>12</sup>

Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement, Jakarta, 1 September 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>)

<sup>12</sup> *Ibid.*

Tabel 4.1  
Rata-rata AFTA / Harga Tarif CEPT oleh Negara (%)

Tahun	2000	2001	2002	2003
Brunei	1.26	1.17	0.96	0.96
Cambodia	10.40	10.40	8.93	7.96
Indonesia	4.77	4.36	3.73	2.16
Laos	7.07	6.58	6.15	5.66
Malaysia	2.85	2.59	2.45	2.07
Philippines	4.97	4.17	4.07	3.77
Singapore	0.00	0.00	0.00	0.00
Thailand	6.07	5.59	5.17	4.63
Vietnam	7.09	7.09	N/A	N/A
ASEAN	3.74	3.54	3.17	2.63

Note: Tingkat tarif rata-rata CEPT untuk ASEAN secara keseluruhan adalah rata-rata tertimbang, dengan jumlah baris tarif di Daftar Inklusi (IL) tahun 1999 digunakan sebagai ukuran.

Meskipun Sekretariat ASEAN mengklaim bahwa AFTA sekarang hampir didirikan, pernyataan ini mungkin agak menyamarkan kebenaran. Beras, dianggap sebagai produk yang sangat sensitif bagi kawasan, masih dikecualikan dari perjanjian AFTA. Selain itu, beberapa anggota masih sangat tidak responsif ketika mereka harus menerapkan tarif lebih rendah pada produk kelompok kritis tertentu. Malaysia, misalnya, menolak untuk mematuhi tenggat waktu AFTA dan terus memungut tarif atas biaya perakitan (CBUs) dan unit otomotif (CKDs). Dengan demikian, Malaysia pasti ingin melindungi produsen mobil negara Proton. Hanya baru-baru ini, CBU otomotif dan CKDs akhirnya telah ditransfer ke IL Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Thailand yang memiliki

pertumbuhan industri otomotif yang pesat, tidak terlalu senang dengan keterlambatan yang signifikan terhadap upaya proses liberalisasi Malaysia.<sup>13</sup>

Masalah yang paling krusial adalah sangat terbatasnya penggunaan dari Skema CEPT. Perhitungan menunjukkan bahwa hanya 5% dari total perdagangan intra-ASEAN dilakukan dengan menggunakan tarif CEPT.<sup>14</sup> Pemimpin ASEAN berusaha keras untuk menyebarkan penggunaan Skema CEPT kepada sektor bisnis lokal. Aturan awal CEPT dan prosedur sertifikasi operasional baru-baru ini telah direvisi untuk disesuaikan lebih baik sesuai tuntutan lingkungan bisnis. Perubahan meliputi pengenalan terhadap:<sup>15</sup>

- a. Standar metode penghitungan lokal / konten ASEAN
- b. Seperangkat prinsip-prinsip untuk menentukan biaya tarif untuk anggota asli ASEAN dan pedoman untuk biaya metodologi
- c. Perawatan khusus dan jelas terhadap pengadaan bahan lokal
- d. Perbaikan proses verifikasi

Sampai sekarang, metode "nilai tambah" (value added) digunakan untuk menentukan asal dari produk yang termasuk dalam Skema CEPT. Nilai tambah menetapkan aturan bahwa setidaknya 40% dari nilai produk harus berasal dari negara-negara asal ASEAN. *Task Force* pada Aturan Asal CEPT saat ini bekerja pada praktek implementasi alternatif dalam menentukan kriteria. Yang disebut "CTH-Change in Tariff Heading Rule (Aturan Perubahan Tarif Pos)" atau "substantial transformation rule (aturan transformasi substansial)" akan menjadi berlaku untuk produk yang tidak dapat memenuhi 40% lokal / persyaratan konten ASEAN.<sup>16</sup> Pengenalan terhadap aturan transformasi substansial akan membuat aturan CEPT dari asal lebih fleksibel, terutama bagi

<sup>13</sup> Economist, *Free Trade in Southeast Asia, More Effort Needed*, The Economist, 29 July 2004 dan AFTA Council, *The Eighteenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 2 September 2004. (<http://www.aseansec.org/16349.htm>)

<sup>14</sup> R.A. Reyes, *The ASEAN Model of Economic Integration*, The Jakarta Post, 19 July 2004.

<sup>15</sup> ASEAN Secretariat, Trade, Jakarta, 2004. ([www.aseansec.org/12021.htm](http://www.aseansec.org/12021.htm))

<sup>16</sup> AFTA Council, *The Seventeenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 1 September 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>)

negara-negara anggota yang lebih miskin, dimana produsen di sektor-sektor tertentu mengalami kesulitan untuk memenuhi 40% persyaratan nilai tambah.<sup>17</sup>

Para pemimpin ASEAN juga menyadari bahwa hambatan non-tarif akan tetap menjadi kendala utama dalam proses kedatangan aliran bebas barang di kawasan. Kemajuan dalam penghapusan tindakan-tindakan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs) yang *indefensible* akan sangat memperlambat, meskipun terdapat prioritas tinggi yang ditetapkan Menteri-menteri ASEAN untuk masalah tersebut. Baru-baru ini, sebuah database NTMs ASEAN telah di *set up* untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang hambatan yang tersisa. Pemimpin ASEAN juga mengundang sektor swasta untuk memberitahu semua NTMs yang terdaftar atau tidak terdaftar sehingga mereka dapat dihilangkan kemudian. Kendala lain yang mungkin jadi penghambat dalam pergerakan bebas barang adalah perbedaan standar produk dan regulasi teknis. Oleh karena itu, Komite Koordinasi ASEAN tentang Standar dan Mutu (ASEAN Coordinating Committee on Standards and Quality /ACCSQ) telah dibuat untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian tentang *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements and for the harmonization of technical regulations and product standards*. Akhirnya, semua negara anggota didorong untuk memenuhi Perjanjian Perizinan Impor WTO secepat mungkin.<sup>18</sup>

Menurut Dewan AFTA, sasaran utama dari setiap FTA adalah mencapai tingkat tarif nol dan pasar bebas yang terintegrasi dengan sirkulasi barang. Negara ASEAN-6 harus mencapai target pada tahun 2010 dan negara-negara CLMV ASEAN pada tahun 2015.<sup>19</sup> Namun, seperti saat ini, pengenaan tarif

---

<sup>17</sup> P. Brenton, *Notes on Rules of Origin with Implications for Regional Integration in South East Asia*, Paper prepared for the PECC Trade Forum, 22-23 April 2003, Washington DC, hal. 16.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, AFTA Council, 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>), dan dalam AFTA Council, *The Eighteenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 2 September 2004. (<http://www.aseansec.org/16349.htm>), ASEAN Sekretariat, *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16659.htm>)

<sup>19</sup> ASEAN Sekretariat, *Southeast Asia, a Free Trade Area*, ASEAN Sekretariat, Jakarta, 2002. ([www.aseansec.org/1205.htm](http://www.aseansec.org/1205.htm))

terhadap 64,12% produk dalam IL ASEAN-6 telah dieliminasi secara penuh.<sup>20</sup> Hal ini sangat jelas bahwa itu akan memakan banyak waktu dan usaha, sebelum arus bebas barang di kawasan ASEAN terlaksana.

Terlepas dari masalah apakah liberalisasi di kawasan ini dilakukan dengan cukup cepat, pertanyaan juga dapat diajukan mengenai kontribusi AFTA bagi kesejahteraan umum. Meskipun sebagian besar penulis setuju pada dampak positif ASEAN terhadap kohesi dan stabilitas politik di kawasan, namun terdapat sedikit konsensus dalam bidang ekonomi pada pembentukan perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara. Krugman menyarankan bahwa FTA antara "mitra dagang alami" lebih mungkin dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dari pada perjanjian antara negara-negara yang terletak tersebar. Jika bias dari pengaturan perdagangan kawasan terlalu besar, akan menyebabkan terjadinya pengalihan perdagangan, termasuk penciptaan perdagangan, sehingga mengurangi kesejahteraan.<sup>21</sup> AFTA merupakan contoh yang baik dari blok perdagangan alami, tetapi juga harus disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN secara tradisional telah melakukan peningkatan ekonomi keluar kawasan (outward-looking economies). Elliot dan Ikemoto mencatat bahwa daripada perdagangan intra regional, perdagangan antar regional telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tiga dekade terakhir atau lebih. Secara teoritis, AFTA bisa dengan mudah memiliki efek pengalihan perdagangan.<sup>22</sup>

Beberapa penelitian empiris baru-baru ini telah menganalisa dampak AFTA pada perdagangan gabungan internasional. Hasil dari studi ini: studi oleh Elliot dan Ikemoto (2004), Gosh dan Yamarik (2002) dan Cernat (2001) menemukan bahwa AFTA menyebabkan terbentuknya jaringan penciptaan perdagangan, sementara Dee dan Gali (2003) dan Soloaga dan Winters (2000)

---

<sup>20</sup> ASEAN Secretariat, ASEAN Annual Report 2003-2004, Chapter 2: *Economic Integration and Cooperation*, Jakarta, 2004. Hal, 17. (<http://www.aseansec.org/ar04.htm>)

<sup>21</sup> P.R. Krugman, *Is Bilateralism bad?*, 1991. In: E. Helpman, and A. Razin, *International Trade and Policy*, MIT Press, Cambridge/London, 1991.

<sup>22</sup> R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, *AFTA and the Asian Crisis: Help or Hindrance to ASEAN Intra-Regional Trade?*, Asian Economic Journal, Vol. 18, No. 1, March 2004, hal, 2.

menunjukkan bahwa AFTA menyebabkan terjadinya pengalihan perdagangan.<sup>23</sup> Harapan teoritis bahwa AFTA akan memiliki efek pengalihan perdagangan yang penting tidak sepenuhnya dikonfirmasi oleh studi-studi sebelumnya. Elliot dan Ikemoto beranggapan bahwa signifikansi dari proporsi perdagangan total antar regional ASEAN dapat dipertahankan. Bahkan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 tidak menyebabkan perubahan besar terhadap kegiatan perdagangan yang berorientasi ke dalam negara-negara anggota ASEAN.<sup>24</sup>

Ekspor Intra-ASEAN sebagai persentase dari total ekspor ASEAN meningkat dari 18% pada 1985 menjadi 23,16% pada tahun 2003, sedangkan pangsa impor intra ASEAN dalam total impor ASEAN naik dari 16% pada 1985 menjadi 20,73% pada tahun 2003. Perdagangan intra ASEAN tampaknya tumbuh pada tingkat yang hanya sedikit di atas laju pertumbuhan perdagangan global ASEAN.

Selain itu, perdagangan intra ASEAN telah meningkat dengan kecepatan jauh lebih lambat dibandingkan dengan perdagangan di antara negara-negara berkembang Asia Timur pada umumnya. Peningkatan PDB yang kuat di negara-negara berkembang dan gerakan global menuju liberalisasi perdagangan, merupakan faktor utama untuk menjelaskan tren ini. Akibatnya, ASEAN masih kalah jauh dibandingkan dengan kawasan Asia Timur. Maka, jadi tidak mengejutkan jika ASEAN berpaling ke negara tetangganya untuk merevitalisasi kinerja perdagangan.<sup>25</sup> Dan berharap bahwa pengaturan perdagangan bebas akan memberikan dampak positif terhadap daya saing global ASEAN dalam jangka panjang.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil dari studi ini dilakukan oleh S. Coulibaly, *On the Assessment of Trade Creation and Trade Diversion Effects of Developing RTAs*, Unpublished Working Paper, 15 November 2004, hal, 2.

<sup>24</sup> *Op.cit*, R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, hal, 16-17.

<sup>25</sup> *Op.cit*, AFTA Council, 2004 dan S.F. Naya, *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal, 13-14.

<sup>26</sup> *Op.cit*, R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, hal, 17.

### 4.3 Dari AFTA Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Asia tidak berbeda dengan kawasan lain di dunia. Peningkatan regionalisme di Asia harus dilihat dari perspektif dengan kecenderungan mengarah ke arah inisiatif kolaborasi regional dalam skala dunia. Lambatnya proses liberalisasi dalam kerangka-WTO dan gagasan bahwa perjanjian integrasi regional adalah upaya untuk mewujudkan perdagangan bebas global,<sup>27</sup> telah menyebabkan terhadap suatu proliferasi dalam jumlah perjanjian FTA regional. Banyak FTA regional terwujud seperti apa telah yang ditetapkan oleh WTO dan oleh karena itu dilambangkan sebagai perjanjian WTO-plus.<sup>28</sup> Perlu dicatat bahwa gerakan menuju regionalisme telah berjalan di Eropa dan Amerika, tapi untuk Asia baru di mulai baru-baru ini.<sup>29</sup> Bahkan sebelum AFTA secara resmi dilaksanakan pada tahun 2003, negara anggota ASEAN baru mulai berbicara lebih lanjut tentang inisiatif integrasi ekonomi.

Krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 sering dianggap sebagai penyebab langsung bagi peningkatan regionalisme di Asia. Krisis yang terjadi menunjukkan bahwa ekonomi Asia Timur terkait erat dan secara *de facto* integrasi di kawasan itu sudah mulai jauh lebih awal: sejak paruh kedua tahun 1980-an, jaringan produksi telah muncul di kawasan Asia Timur, dengan perusahaan multinasional menyebarkan produksi mereka kepada negara yang berbeda di kawasan ini. Perusahaan multinasional dari Jepang, dan kemudian juga dari negara-negara industri baru (NIC), memindahkan beberapa kegiatan produksi mereka ke Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari penawaran tenaga kerja murah.<sup>30</sup>

Terlepas dari kesadaran bahwa ekonomi mereka sangat saling ketergantungan, para pemimpin Asia Timur juga berpikiran bahwa tidak lagi terdapat dukungan dari lembaga-lembaga internasional (khususnya IMF) dan mitra dagang utama (Amerika

<sup>27</sup> J. Bhagwati, *The World Trading System at Risk*, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1991, hal. 77.

<sup>28</sup> G.P. Sampson, and S. Woolcock, (Eds.), *Regionalism, multilateralism, and economic integration: the recent experience*, United Nations University Press, Tokyo, 2003.

<sup>29</sup> S.F. Naya, *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal 4-5.

<sup>30</sup> S.Y. Chia, *Economic Co-operation and Integration in East Asia*, Asia-Pacific Review, Vol. 11, No. 1, May 2004, hal, 2 dan *Op.cit*, G.O. Pasadilla, hal, 5

Serikat khususnya) pada kurun waktu krisis keuangan yang terjadi di kawasan selama tahun 1997-1998. Akibatnya, para pemimpin Asia Timur mulai mencari cara untuk mewujudkan perjanjian kerjasama formal dan integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan di akhir tahun 1990-an.<sup>31</sup>

Meskipun krisis keuangan telah menjadi penyebab langsung, ada hal yang juga harus diperhatikan dalam melihat perkembangan dan memahami kemunculan regionalisme di Asia Timur. Akhir Perang Dingin sangat penting dalam proses pemulihan hubungan dengan negara-negara bekas komunis di kawasan, yang sekarang semuanya menjadi anggota ASEAN. Hal ini menjelaskan kenapa selama beberapa tahun terakhir, China menjadi lebih dekat dengan ASEAN. Baik China dan ASEAN memiliki alasan yang baik untuk pertumbuhan kemitraan mereka.<sup>32</sup>

Semua kekuatan ini bersama-sama membuat momentum baik untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di Asia Timur. Pada bulan Desember 1997, para pemimpin ASEAN mengadopsi Visi ASEAN 2020, yang dapat dianggap sebagai *road map* jangka panjang untuk ASEAN. Rencana mewujudkan pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2020, terdiri dari tiga pilar yang berbeda: *Komunitas Ekonomi ASEAN* (AEC), *Komunitas Keamanan ASEAN* (ASC) dan *Komunitas Sosial-budaya ASEAN* (ASCC). Dalam Bali Concord II, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2003 selama KTT ASEAN ke-sembilan, para pemimpin ASEAN secara resmi menyatakan keinginan mereka untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC). AEC dimaksudkan untuk menjadi pasar tunggal dan basis produksi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal lebih bebas. The AEC juga dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata di kawasan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Op.cit, S.F Naya, hal. 7 dan H. Soesastro, *An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How do they fit together?*, Australia-Japan Research Centre at the Asia Pacific School of Economics and Government, Pacific Economic Paper, No. 338, 2003, hal, 3.

<sup>32</sup> *Op, cit*, S.Y. Chia, hal, 2-3.

<sup>33</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Vision 2020*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997. ([www.aseansec.org/2357.htm](http://www.aseansec.org/2357.htm))

Dengan membuat AEC, ASEAN bermaksud untuk menanggapi blok perdagangan regional lainnya, seperti Uni Eropa dan NAFTA. Perluasan dari Uni Eropa misalnya, terdapat ketakutan dengan akan adanya pengalihan FDI, yaitu meningkatnya pangsa investasi langsung luar negeri Eropa yang mengalir ke negara-negara anggota baru daripada ke kawasan ASEAN. Bahkan yang lebih menantang adalah persaingan dari produsen biaya rendah lain di Asia, seperti China dan India. Raksasa ekonomi baru ini tidak hanya memiliki pasokan tenaga kerja murah yang berlimpah, tetapi juga memiliki konsumen pasar domestik yang sangat besar. Dengan membentuk komunitas ekonomi, para pemimpin ASEAN berharap untuk dapat mengintegrasikan pasar nasional dari negara-negara anggota. Proses integrasi harus sepenuhnya memanfaatkan keberagaman di daerah untuk lebih terspesialisasi, untuk dapat lebih efisien dan mewujudkan skala ekonomi yang diperlukan. Diharapkan bahwa setiap anggota ASEAN akan dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan komparatif, sehingga kawasan lebih berdaya saing secara keseluruhan.<sup>34</sup>

*The original Hanoi Plan of Action*, dibuat di tahun 1998 untuk menjadi pedoman sebagai tujuan akhir dari AEC (baru-baru ini telah diganti dengan *Vientiane Plan of Action*, lanjutan rencana enam tahun yang berfokus untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN dan sebagai langkah lebih lanjut memperdalam integrasi ekonomi regional. Salah satu unsur rencananya adalah pembentukan Dana Pembangunan ASEAN, yang akan dapat mendorong pembangunan negara-negara ASEAN- CLMV.<sup>35</sup>

Integrasi ekonomi yang lebih mendalam akan dilakukan dengan cara percepatan integrasi 11 sektor prioritas sebagai berikut: (i) produk berbasis agro, (ii) perjalanan udara, (iii) otomotif, (iv) e-ASEAN, (v) elektronik, (vi) perikanan, (vii) kesehatan,

---

<sup>34</sup> R.A. Reyes, *The ASEAN Model of Economic Integration*, The Jakarta Post, 19 July 2004 dan D. Hew, *Towards an ASEAN Economic Community by 2020: Vision or Reality?*, Institute of South East Asian Studies (ISEAS) Viewpoints, 16 June 2003.

<sup>35</sup> ASEAN Secretariat, Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16631.htm>)

(viii) produk berbasis karet, (ix) tekstil dan pakaian jadi, (x) pariwisata, dan (xi) produk berbasis kayu.<sup>36</sup>

Untuk masing-masing 11 sektor prioritas, spesifik *road map* (Protokol Integrasi Sektoral ASEAN) telah dikembangkan bersama dengan sektor swasta. *Road map* ini menunjukkan jangka waktu proses liberalisasi dan jadwal spesifik yang harus dilaksanakan sampai tahun 2010 dalam rangka memfasilitasi percepatan integrasi 11 sektor tersebut di ASEAN. Tarif Impor pada produk di bawah sektor prioritas harus benar-benar dihapuskan pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk ASEAN-CLMV. Perlu dicatat bahwa target pelaksanaan lebih cepat 3 tahun yang diramalkan di bawah perjanjian AFTA. Mirip dengan proses liberalisasi perdagangan di bawah AFTA, skema *fast track* telah dikembangkan untuk mempercepat integrasi menuju AEC, termasuk sekitar 40% dari total tarif baris di ASEAN. Keputusan untuk mempercepat pelaksanaan integrasi ekonomi di sektor-sektor tertentu dianggap berani, karena 11 sektor prioritas bersama merupakan lebih dari 50% dari perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2003.<sup>37</sup>

Dengan penurunan tarif yang dilakukan secara bertahap dan berbeda bertahap diantara ASEAN-6 dan ASEAN-CLMV (negara-negara terakhir ini selalu diizinkan untuk mengajukan jadwal waktu yang kurang ketat), dapat dijelaskan bahwa masalah fleksibilitas merupakan properti yang berbeda dalam proses integrasi ekonomi ASEAN. Masalah fleksibilitas baru-baru ini telah diatur dalam pendekatan "ASEAN minus X", yang berarti bahwa semua anggota ASEAN harus setuju pada target spesifik yang harus dicapai, akan tetapi anggota individu dapat memutuskan untuk bergabung kemudian, atau pada saat yang sama.<sup>38</sup>

Tujuan ASEAN ingin mencapai AEC, tidak cukup dengan hanya meliberalisasi perdagangan barang dan jasa. Tantangan terbesar sebelum ASEAN memenuhi tujuan lain adalah pergerakan bebas investasi dan tenaga kerja terampil, dan aliran modal

<sup>36</sup> ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16659.htm>)

<sup>37</sup> ASEAN Secretariat, Media Release "ASEAN Accelerates Integration of Priority Sectors", Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16620.htm>)

<sup>38</sup> *Ibid*, R. A. Reyes, 2004 dan D. Hew, 2003.

lebih bebas. Investor asing yang ingin membangun sebuah bisnis yang sukses dan akibatnya ingin repatriasi keuntungan mereka, masih banyak dirugikan oleh hukum nasional di negara-negara anggota ASEAN yang lebih mendukung investor domestik. Harus diperhatikan bahwa negara-negara lain seperti China berkeinginan untuk menerima para investor asing. Oleh karena itu perubahan mendasar dalam pola pikir masyarakat dalam kawasan ASEAN sangat dibutuhkan, dimana investasi asing akan menguntungkan konsumen ASEAN yang dalam jangka panjang. Begitu juga dengan pergerakan bebas tenaga kerja terampil, para pemimpin ASEAN harus bisa menjabarkan dengan jelas definisi tentang tenaga kerja terampil untuk masing-masing 11 sektor prioritas. Jika hanya menggunakan kriteria umum, batas-batas nasional untuk tenaga kerja terampil akan hilang dalam ASEAN.<sup>39</sup>

Meskipun terdengar sama, perbedaan struktural antara Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diusulkan (AEC) dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, yang berkembang menjadi Uni Eropa (UE), tidak boleh diabaikan. Sebagai individu negara-negara ASEAN menolak untuk menyerahkan kebijakan ekonomi nasional vis-a-vis non-anggota, *set up* AEC tidak akan termasuk tarif eksternal umum. Hal ini menjadi tidak terlalu mengherankan, karena disadari terdapat perbedaan besar antara negara anggota di tingkat tarif rata-rata eksternal.<sup>40</sup> Singapura misalnya, pada dasarnya adalah pelabuhan bebas dan tidak melakukan pungutan tarif impor. Untuk sampai pada suatu tarif eksternal umum, Singapura harus melakukan pemungutan tariff atau sembilan anggota negara ASEAN lainnya harus menghapuskan tarif yang mereka terapkan.<sup>41</sup> Selain itu, konvergensi paksa penerapan tarif eksternal dalam jangka pendek tidak akan bijaksana sebagai terdapat kesenjangan pembangunan yang masih terlalu besar antara ASEAN-6 dan ASEAN-CLMV. Dalam jangka panjang konvergensi tampaknya diinginkan, tetapi terhambat oleh kurang seriusnya mekanisme kelembagaan dan struktural supranasional.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, R. A Reyes, 2004.

<sup>40</sup> *Op.cit*, Economist, 2004.

<sup>41</sup> *Op.cit*, R. A Reyes, 2004.

<sup>42</sup> L. Cuyvers, *Contrasting the European Union and ASEAN Integration and Solidarity*, Paper presented at the Fourth EU-ASEAN Think Tank Dialogue "EU and ASEAN – Integration and Solidarity", Brussels, 25-26 November 2002.

Semua ini berarti bahwa ASEAN tidak mengikuti contoh Uni Eropa dan agak berusaha untuk mendirikan sebuah pasar tunggal tanpa harus menginstall sebuah kesatuan pabean atau menciptakan beberapa otoritas supranasional. Ini sebenarnya tidak mengherankan sebagaimana anggota ASEAN selalu menolak untuk mendelegasikan kekuasaan kepada suatu badan supranasional. Dalam hal ini menarik untuk dicatat bahwa ASEAN didirikan oleh suatu pernyataan dan bukan dengan perjanjian, yang berarti bahwa ASEAN benar-benar tidak memiliki kepribadian hukum (legal personality). Uni Eropa di sisi lain, tidak memiliki kepribadian hukum dan membuang Komisi yang mendominasi untuk menerapkan dan menegakkan keputusan.<sup>43</sup> Sekretariat ASEAN pada gilirannya, baru didirikan sepuluh tahun setelah pendiri ASEAN dan telah berada di bawah tekanan sejak itu. Akibatnya, keraguan tetap muncul apakah Sekretariat ASEAN akan mampu merampingkan proses integrasi menuju AEC.<sup>44</sup> Dan yang harus dilihat adalah apakah dalam prakteknya pemerintah nasional akan menegakkan langkah-langkah yang sesuai dengan *road map* untuk 11 sektor prioritas, diberi wewenang terbatas oleh Sekretariat ASEAN.<sup>45</sup>

#### 4.4 Evolusi Dari Integrasi Ekonomi ASEAN Dalam Konteks Regional

ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara anggota asli (ASEAN-5), yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 tahun 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 Juli April 1999. Dengan tujuan, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi ASEAN, adalah: (i) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan, dan (ii) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui rasa hormat mematuhi keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Op.cit.*, Economist, 2004 dan Naya, 2004, hal, 11-12

<sup>45</sup> *Op.cit.*, R. A. Reyes, 2004.

#### 4.4.1 Komunitas Ekonomi ASEAN: Tujuan Akhir Di Tahun 2015

Pada bulan November 2002, para Kepala Pemerintahan ASEAN merekomendasikan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020; yang kemudian dipercepat menjadi 2015. Proposal ini didukung oleh berbagai pertimbangan, termasuk: (i) keinginan untuk menciptakan agenda pasca AFTA, (ii) kebutuhan untuk memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ini dalam upaya peningkatan kawasan perdagangan bebas (FTA), (iii) kemungkinan bahwa FTA bilateral, yang anggota bebas untuk terlibat, akan membahayakan integrasi ASEAN, dan (iv) pasca-1997, pelajaran krisis keuangan Asia yang mengakui pentingnya kerjasama baik dalam sektor riil dan keuangan, dan arus bebas tenaga kerja terampil.<sup>46</sup>

Tahun berikutnya, pada tahun 2003, ASEAN memutuskan untuk mengejar integrasi yang lebih komprehensif terhadap pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dengan didirikan tiga pilar komunitas politik dan keamanan, integrasi ekonomi, dan sosial-budaya kerjasama, untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). ASC bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan itu hidup damai satu sama lain dan dengan dunia pada umumnya, demokratis dan harmonis lingkungan saja. AEC merupakan realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran dan ekonomi yang berdaya saing tinggi di kawasan ASEAN dengan berupa aliran bebas barang dan jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2015. ASCC dibayangkan untuk menciptakan kawasan bersama yang berikat dalam kemitraan sebagai komunitas masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan budaya. *The Vientiane Action Program* (November 2004) menggambarkan bagaimana ketiga pilar terjalin erat:

---

<sup>46</sup> Michael. Plummer, "The ASEAN Economic Community and the European Experience", ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No.1, Asian Development Bank, July 2006.

*"Karena pertumbuhan ekonomi dapat terancam oleh ketidakadilan sosial yang pada gilirannya merusak stabilitas politik, aksi program sosial-budaya ASEAN terkait erat dengan pilar ekonomi dan keamanan dalam Komunitas ASEAN. Pembentukan ASCC berasal dari premis bahwa integrasi ekonomi dan keamanan saja tidak akan cukup untuk mewujudkan visi dari sebuah Komunitas ASEAN."*

Dimensi keempat bisa ditambahkan ke tiga pilar menuju pencapaian tujuan mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Meskipun diakui bahwa integrasi ekonomi regional dapat meningkatkan konvergensi pendapatan di negara-negara di kawasan, akan tetapi ASEAN prihatin tentang risiko mengingat potensi kesenjangan yang ada dalam dimensi pendapatan dan pembangunan manusia di antara negara-negara anggotanya. Untuk mempersempit kesenjangan pembangunan (NDG), diperkenalkan pada bulan Juli 2001, ASEAN mengeluarkan Deklarasi Hanoi untuk Mempersempit Gap Pembangunan menuju Integrasi ASEAN yang lebih mendalam, dan kemudian ditegaskan kembali dalam Bali Concord II pada tahun 2003.

AEC akan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keragaman yang mencirikan daerah menjadi kesempatan bagi komplementasi bisnis dan membuat ASEAN lebih dinamis dan segmen kuat dari rantai pasokan global. ASEAN telah sepakat pada hal berikut: (i) mekanisme lembaga baru dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan prakarsa ekonomi yang ada seperti AFTA, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan AIA; (ii) mempercepat integrasi regional pada tahun 2010 dalam 11 sektor prioritas, yaitu, perjalanan udara, produk berbasis agro, otomotif, e-commerce, elektronik, perikanan, kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, dan produk berbasis kayu; (iii) memfasilitasi pergerakan bisnis masyarakat, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan (iv) memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, termasuk perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN untuk menjamin dan mengikat secara hukum-resolusi yang cepat dari setiap sengketa ekonomi.

#### 4.4.2 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN

Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), yang secara resmi disepakati dalam KTT ASEAN pada bulan November 2007, adalah perkembangan yang sangat signifikan dalam upaya ASEAN, berdasarkan realisasi substansial ASEAN Free Trade Area (AFTA), terhadap AEC. Cetak Biru AEC adalah titik awal bagi ASEAN. Dengan menerapkan Cetak Biru, ASEAN telah bergerak dari proses integrasi menuju pelaksanaan integrasi dengan terdapat batas waktu dan tujuan akhir yang didefinisikan secara jelas. Cetak Biru AEC juga merupakan dokumen yang mengikat komitmen seluruh anggota.<sup>47</sup>

Terdapat empat karakteristik utama dalam Cetak Biru AEC, yaitu: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang seimbang; dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Ciri keempat menunjukkan “sifat terbuka” ASEAN yang ingin mengejar integrasi ekonomi regional (regionalisme terbuka). Dari sudut pandang Geografi Ekonomi Baru dan teori perdagangan fragmentasi, Cetak Biru AEC merupakan sebuah paket kebijakan, dirancang untuk mengurangi link layanan dan set-up biaya jaringan, untuk mengejar integrasi ekonomi yang lebih mendalam dan mempersempit kesenjangan pembangunan di kawasan Asia Timur.

Cetak Biru ini mengidentifikasi “17 unsur inti” dari AEC dan menggambarkan 176 tindakan prioritas yang harus dilakukan dalam jadwal strategis pelaksanaan empat periode (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015). Perlu dicatat bahwa beberapa gol dalam Cetak Biru tetap samar-samar ditetapkan dan "tonggak" masih hilang. Dengan demikian, implementasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan AEC.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Op.cit, Hadi Soesastro, *Implementing the ASEAN Economic Community Blueprint*, hal. 33.

<sup>48</sup> Lihat, *Deepening Economic Integration: The Asean Economic Community And Beyond*, hal. 28-29.

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada kekeluasaan, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Komunitas Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat

mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitif oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar tunggal, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN melihat bagaimana liberalisasi perdagangan di wilayah ini akan dilaksanakan, dan bagaimana standard-standard umum dikembangkan. Selain itu, kerja sama dan alih teknologi dengan bantuan organisasi-organisasi internasional/regional (seperti Food and Agricultural Organization/FAO) dan sektor swasta juga menjadi perhatian ASEAN. Hal ini juga mengundang produsen pertanian melalui promosi dan berjaringan kerja sama pertanian.

Selain pasar tunggal, Komunitas Ekonomi ASEAN juga melihat sebuah kawasan ekonomi dengan semangat kompetisi yang tinggi, pembangunan ekonomi yang setara, dan integrasi penuh dalam ekonomi global. Pembangunan kawasan kompetitif ini akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan bersama dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk itu, ASEAN akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pajak dan e-commerce. ASEAN akan mendirikan sebuah jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat); mengembangkan sistem ICT yang dapat dihubungkan dan digunakan oleh semua negara di kawasan ini; mencari proyek-proyek untuk jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi; mempromosikan sektor penambangan; dan menarik sektor swasta untuk mendanai upaya-upaya tersebut. Soal kesetaraan akan tercapai terutama melalui pengembangan perusahaan kecil dan medium (small and medium enterprises); dan dengan

mengatasi kesenjangan pembangunan antara negara-negara ASEAN yang kaya/besar dengan yang miskin/kecil, dan antara ASEAN dengan kawasan lainnya melalui Initiative for ASEAN Integration (IAI). IAI adalah sebuah proyek yang mengupayakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN agar mampu berpartisipasi penuh dalam integrasi kawasan. Akhirnya, Komunitas Ekonomi ASEAN mengusahakan keselarasan kesepakatan ASEAN dengan peraturan dan undang-undang multilateral, dan membuat kebijakan yang akan lebih jauh mengintegrasikan kawasan tersebut dengan dunia.

Tabel 4.2  
Unsur Penting Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN<sup>49</sup>

Ciri-ciri	Unsur Penting
<b>A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi</b>	
<i>Aliran bebas barang-barang</i>	<p><u>Penghapusan Tarif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018)</li> <li>- Sektor-sektor Integrasi Prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV</li> <li>- Tarif Daftar Sensitif (SL) sebesar 0-5% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Viet Nam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1</li> </ul>

<sup>49</sup> <http://www.asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, download tanggal 20 Mei 2010, jam 02.43.

	<p>Januari 2017 untuk Kamboja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fase produk-produk dalam Daftar Pengecualian Umum (<i>General Exceptions List</i>)</li> </ul> <p><u>Penghapusan Hambatan-hambatan Non Tarif</u></p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV</p> <p>Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui: Fasilitasi perdagangan, integrasi bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN</p>
<i>Aliran bebas jasa-jasa</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015</li> <li>o Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020</li> <li>o Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEAN Minus X</li> <li>o Pengaturan-pengaturan Pengakuan yang Setara (<i>Mutual recognition arrangements/MRAs</i>)</li> </ul>
<i>Aliran bebas investasi</i>	<p>Kawasan Investasi ASEAN (<i>ASEAN Investment Area/AIA</i>) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor, dengan beberapa pengecualian)</p> <p>Pembentukan Kesepakatan Investasi Komprehensif ASEAN (<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA</i>)</p>
<i>Aliran modal yang lebih bebas</i>	<p>Memperkuat Pembangunan dan Integrasi Pasar Modal ASEAN, dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar.</p>
	<p>Fasilitasi pergerakan dan pengkaryaan</p>

<i>Aliran bebas buruh terampil</i>	buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi.
<i>Sektor-sektor Integrasi Prioritas</i>	Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi.
<i>Pangan, Pertanian, dan Kehutanan</i>	<p>Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan, penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standard-standard yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas.</p> <p>Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan sektor swasta.</p> <p>Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN.</p>
<b>B. Kawasan Ekonomi Kompetitif</b>	
	<p>Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual.</p> <p><u>Pembangunan Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; Pasar Aviiasi/Penerbangan Tunggal ASEAN; Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN</li> <li>- Interkoneksi dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-commerce</li> <li>- Kerja sama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans-ASEAN atau ASEAN Power Grid/APG)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang)</li> <li>- Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta</li> </ul> <p>Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce</p>
<b>C. Pembangunan Ekonomi yang Setara</b>	
	<p>Cetak Biru kebijakan ASEAN untuk Pengembangan Ekonomi Kecil Menengah 2004-2014</p> <p>Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) – yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia</p>
<b>D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global</b>	
	<p>Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakukannya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN)</p> <p>Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global</p>
<b>IMPLEMENTASI</b>	
<b>Mekanisme Implementasi/Penerapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparansi dalam pemberitahuan</li> <li>• Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan</li> <li>• Konsensus</li> <li>• Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa</li> <li>• Rumusan ASEAN-X</li> <li>• Kelonggaran/fleksibilitas</li> </ul>
<b>Komunikasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rencana komunikasi</li> <li>• Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka</li> <li>• Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan</li> <li>• Website Masyarakat Ekonomi ASEAN</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dana Pembangunan ASEAN (ADF)</li> <li>• Studi-studi teknis</li> </ul>

Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional</li> <li>• Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta</li> <li>• Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN</li> <li>• Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota</li> <li>• Pengembangan kapasitas untuk anggota baru</li> </ul>
Tinjauan	Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN

- ❖ ASEAN-6 terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
- ❖ CLMV meliputi Kamboja, RDR Laos, Myanmar, dan Viet Nam.

#### 4.5 Open Regionalism

Masih belum jelas bagaimana bentuk AEC yang akan diterapkan. Salah satu bentuk yang bisa digunakan adalah pengaturan "FTA-plus", yang meliputi beberapa unsur pasar umum, misalnya, aliran bebas modal, aliran bebas tenaga kerja terampil, nol tarif perdagangan intra-regional, tetapi tidak termasuk tarif eksternal umum. Bentuk lain adalah pengaturan "common market minus" yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang terintegrasi secara penuh tetapi memiliki area di mana anggota ASEAN akan terintegrasi lebih dalam untuk tahap selanjutnya.

Yang jelas adalah kenyataan bahwa tidak seperti integrasi ekonomi Eropa yang tampak sebagai pendekatan *inward-looking* dalam regionalisme, integrasi ekonomi ASEAN telah terarah pada "open regionalism (regionalisme terbuka)" mengingat bahwa betapa pentingnya menjalin mitra ekonomi di luar kawasan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya proliferasi FTA baru-baru ini di kawasan, terutama dengan Cina, Jepang dan Republik Korea, yang secara kolektif disebut ASEAN +3.

Tabel 4.3  
FTA ASEAN dengan China-India

Negara	Status	Realisasi
China	Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Mekanisme Penyelesaian Sengketa diselesaikan; negosiasi mengenai layanan dan investasi (akan dilaksanakan berlangsung)	2010-ASEAN 6 2015-CLMV
India	Negosiasi modalitas untuk pengurangan tarif dan penghapusan selesai; program panen awal (early harvest program) diharapkan akan dilaksanakan pada bulan April 2005	2011-Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand

Sumber: ASEANONE, *FTAs with dialogue partners: Compatible with ASEAN integration?*, January 2005.

AEC adalah jelas sebuah inisiatif ambisius, dalam arti bahwa membayangkan ASEAN untuk mendirikan sebuah komunitas ekonomi dengan 10 negara heterogen dalam jangka waktu yang relatif singkat. Walaupun mungkin terdengar paradoks, untuk memaksimalkan manfaat dari pembentukan AEC, ASEAN tidak dianjurkan untuk membatasi diri ke AEC. Setidaknya ada dua arah yang harus diperhatikan ASEAN untuk mewujudkan AEC, cakupan geografis dan kedalaman integrasi ekonomi.<sup>50</sup>

ASEAN juga dibayangi oleh China dan India dari segi produk domestik bruto dan jumlah penduduk. Ukuran sebenarnya tidak menjadi masalah, karena negara-negara ASEAN secara kolektif lebih kuat dan lebih tangguh daripada mereka secara individual, namun terdapat batasan dalam kekuatan ekonomi yang dimiliki ASEAN. Oleh sebab itu, ASEAN tidak bisa bersikap autarki atau eksklusif. ASEAN perlu menjangkau batas luar regionalnya. Untungnya, sebagai kelompok ekonomi yang berorientasi ekspor, ASEAN selalu menjadi entitas yang *outward-looking*. Memang,

<sup>50</sup> *Op.cit.*, Lihat, *Deepening Economic Integration: The Asean Economic Community And Beyond*, hal 37-38

hubungan eksternal ASEAN jauh lebih kuat dibanding hubungan internal, seperti yang dimanifestasikan dalam perdagangan dan jaringan investasi. Arus masuk FDI ekstra-regional ke ASEAN jauh lebih penting bagi negara-negara anggotanya dari daerah aliran FDI-intra.

ASEAN diharapkan menjadi puncak arsitektur regional yang lebih luas dengan AEC sebagai komunitas ekonomi regional, sebuah pasar tunggal tanpa batas, memastikan alokasi sumber daya yang efisien ASEAN dengan spesialisasi intra-ASEAN dan pembagian kerja. Untuk koordinasi kebijakan makroekonomi, moneter dan kerja sama keuangan yang efektif dan berarti, ASEAN perlu bekerjasama dengan China, Jepang dan Korea di bawah payung APT. APT akhirnya akan berevolusi untuk memasukkan Taiwan dan Utara Korea. Sedangkan India sudah menjadi anggota EAS dan sangat mungkin bahwa APEC juga dapat diperluas untuk mencakup India.

#### **4.6 FTA ASEAN Dengan China-India**

Efektifitas pelaksanaan AFTA yang melibatkan beberapa FTA-ASEAN juga sangat penting, karena di Asia Timur sejumlah FTA bilateral/plurilateral sudah dilaksanakan, atau dalam proses negosiasi, termasuk yang dilakukan oleh masing-masing negara-negara anggota ASEAN.

##### **4.6.1 FTA ASEAN Dengan China (ACFTA)**

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak

ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.<sup>51</sup>

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.<sup>52</sup>

#### 4.6.1.1 TUJUAN FTA ASEAN-CHINA

- Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
- Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
- Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
- Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan

<sup>51</sup> Lihat, *ASEAN-China Free Trade Area*, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kerjasama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.

<sup>52</sup> Ibid, hal. 2

menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.<sup>53</sup>

#### 4.6.1.2 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

##### 1. Early Harvest Program (EHP)

- Produk-produk dalam EHP antara lain:

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA).

Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.

- Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

##### 2. Normal Track

- Threshold :

40% at 0-5% in 2005

100% at 0% in 2010 (Tariff on some products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012)

##### 3. Sensitive Track

- Sensitive List (SL) :

(a) Tahun 2012 = 20%

(b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.

(c) Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat

<sup>53</sup> Ibid, hal, 2.

Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik.

- Highly Sensitive List (HSL)
  - (a) Tahun 2015 = 50%
  - (b) Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.<sup>54</sup>

#### 4.6.1.3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA

Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA.

Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons.

Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti: (a) business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting; (b) construction and engineering related services; (c) tourism and travel related services; (d) transport services; educational services; (e) telecommunication services; (f) health-related and social services; (g) recreational, cultural and sporting services; (h) environmental services; dan (i) energy services.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Ibid, hal. 3-4.

<sup>55</sup> Ibid, hal. 5

#### 4.6.1.4 PERSETUJUAN INVESTASI

Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi.

Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan.

Dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.<sup>56</sup>

#### 4.6.1.5 KERJASAMA EKONOMI

Didalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*, kedua pihak

---

<sup>56</sup> Ibid, hal. 6.

sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti: Pertanian; Teknologi Informasi; Pengembangan SDM; Investasi; Pengembangan Sungai Mekong; Perbankan; Keuangan; Transportasi; Industri; Telekomunikasi; Pertambangan; Energi; Perikanan; Kehutanan; Produk-Produk Hutan dan sebagainya.

Pemerintah China telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah *China-ASEAN Investment Cooperation Fund* untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi dan bidang-bidang lainnya sekaligus menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomi dibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan.<sup>57</sup>

#### 4.6.2 FTA ASEAN Dengan India (AIFTA)

India merupakan mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. Dari sisi investasi, FDI dari India ke ASEAN pada tahun 2007 mencatat nilai USD 641 juta—tertinggi sejak tahun 2000.<sup>58</sup>

Perdagangan ASEAN-India cenderung meningkat belakangan ini. Dari tahun 2005 s/d tahun 2007, perdagangan ASEAN-India meningkat sebesar 28% per tahun. Ekspor ASEAN ke India antara 2005-2007 meningkat sebesar 31%--peningkatan terbesar yang dialami ASEAN dengan mitra dagangnya.

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN dan India* pada bulan Oktober 2003.

Setelah pernah dihentikan 2 kali, perundingan perdagangan barang telah dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi

<sup>57</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>58</sup> Lihat, *ASEAN-India Free Trade Area*, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kerjasama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.

ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sementara itu, perundingan perdagangan jasa dan investasi akan dimulai kembali pada bulan Oktober 2009 dan ditargetkan untuk dituntaskan pada akhir tahun 2010 sebagai sebuah Single Undertaking.

Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang dicapai antara ASEAN dengan mitra FTA lainnya. Namun kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komitmen liberalisasi melalui proses “review” setelah perjanjian diimplementasikan.<sup>59</sup>

#### 4.6.2.1 PERDAGANGAN BARANG

##### 1. Modalitas Penurunan/Penghapusan Tarif

Modalitas yang disepakati bersama oleh ASEAN dan India adalah menjadwalkan penurunan dan penghapusan tarif terhadap 85% pos tarif atau 75% nilai impor yang tercakup dalam Normal Track (NT) dan 10% pos tarif dalam Sensitive Track (ST) dengan rincian sebagai berikut:

- NT-1 : mencakup penghapusan bea masuk atas 71% pos tarif atau 71,71% nilai impor pada 31 Des 2012 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2017 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2017 untuk CLMV.
- NT-2 : terdiri dari sejumlah 9% pos tarif, dimana tarif bea masuk dan produk-produknya akan dihapus pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.
- ST : terdiri dari 10% pos tarif yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu :
  - Penurunan bea masuk menjadi 5% pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.
  - Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2021 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2023 untuk ASEAN 6 dan India.
  - Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat tarif 5%. Selebihnya akan diturunkan menjadi 4.5% pada saat Entry

---

<sup>59</sup> Ibid, hal. 1.

into Force, dan akan menjadi 4% pada 31 Des 2015 for ASEAN 6 dan India.

- Spesial Products, terdiri dari:
  - Palm Oil, end rates 37.5% - CPO dan 45% - RPO dengan batas akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
  - Kopi, teh hitam dan lada, end rates 45%, 45%, dan 50% dengan batas akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
  - Crude Petroleum (berlaku untuk Brunei) dengan penurunan bea masuk bertahap sampai menjadi 0% pada 1 Januari 2012.
- Highly Sensitive List (HSL), mencakup 3 kategori yang berbeda yaitu (i) penurunan bea masuk menjadi 50%, (ii) penurunan bea masuk 50%, serta (iii) penurunan bea masuk 25%, pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5, 31 Des 2021 untuk Philipina serta 31 Des 2023 untuk CLMV.
- Exclusion List (EL): terdiri dari 489 pos tariff dalam 6 digit dan mencakup 5% nilai impor perdagangan.<sup>60</sup>

Tabel 4.4  
Matriks Perbandingan Kesepakatan FTA ASEAN dengan China-India

China	India
<b>Persetujuan Barang</b>	
1. Early Harvest Program (EHP) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk-produk dalam EHP antara lain: Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan</li> <li>• Kesepakatan Bilateral Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.</li> </ul> 2. Normal Track <ul style="list-style-type: none"> <li>• Threshold : 40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (Setidaknya 150 tarif pada beberapa produk akan dihapuskan pada tahun 2012)</li> </ul> 3. Sensitive Track <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensitive List (SL) :</li> </ul>	1. Modalitas Penurunan / Penghapusan Tarif terhadap 85% pos tarif atau 75% nilai impor yang tercakup dalam Normal Track (NT) dan 10% pos tarif dalam Sensitive Track (ST) dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NT-1 : mencakup penghapusan bea masuk atas 71% pos tarif atau 71,71% nilai impor pada 31 Des 2012 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2017 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2017 untuk CLMV.</li> <li>• NT-2 : terdiri dari sejumlah 9% pos tarif, dimana tarif bea masuk dan produk-produknya akan dihapus pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018</li> </ul>

<sup>60</sup> Ibid, hal. 3-4

<p>a) Tahun 2012 = 20%</p> <p>b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.</p> <p>c) Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Highly Sensitive List (HSL)       <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tahun 2015 = 50%</li> <li>b) Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.</li> </ul> </li> </ul>	<p>untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST : terdiri dari 10% pos tarif yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan bea masuk menjadi 5% pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.</li> <li>2. Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2021 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2023 untuk ASEAN 6 dan India.</li> <li>3. Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat tarif 5%. Selebihnya akan diturunkan menjadi 4.5% pada saat Entry into Force, dan akan menjadi 4% pada 31 Des 2015 for ASEAN 6 dan India.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Jasa</b>	
<p>Berlaku efektif pada Juli 2007 pada 4 modal penyediaan jasa yaitu: pasokan lintas-perbatasan, konsumsi luar negeri, komersial, pergerakan laju individu.</p>	<p>Perdagangan ASEAN-India di layanan jasa saat ini masih dalam tahap negoisasi.</p>
<b>Investasi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan Investasi ASEAN-China dimana terdapat one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan.</li> <li>2. Pemerintah China mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah <i>China-ASEAN Investment Cooperation Fund</i> untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, IPTEK.</li> </ol>	<p>Perdagangan ASEAN-India di perjanjian investasi saat ini masih dalam tahap negoisasi.</p>

## Kesimpulan

Sebagai dampak dari perkembangan regionalism di kawasan mengakibatkan ASEAN harus menyelaraskan diri mereka dengan perkembangan yang terjadi diluar kawasan. Untuk itu ASEAN harus bersikap membuka diri untuk membangun kerjasama guna menghadapi persaingan dan berupaya untuk membuka pasar yang lebih luas serta untuk mendapatkan FDI guna mendukung upaya pembangunan di negara-negara ASEAN.

Sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh ASEAN, selain melakukan integrasi (ekonomi) yang lebih mendalam adalah dengan cara membuka hubungan kerjasama (FTA) dengan negara-negara lain diantaranya China-India, dua negara yang sedang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan. Langkah terbaik bagi ASEAN dalam menghadapi kebangkitan China-India sebagai kekuatan besar (ekonomi) yang mempunyai kepentingan strategis di kawasan adalah dengan mengembangkan regionalisme multilateral melalui berbagai forum seperti ARF, ASEAN Plus Three (APT), dan East ASEAN Summit. Langkah ini dimaksudkan untuk membentuk suatu regionalisme terbuka-*inklusif* (*open regionalism*) atas kerjasama fungsional.